

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang (Mardiasmo 2009). Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk pencapaian tujuan suatu organisasi dan dana sumber ekonomi yang di sediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut memungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya (Setiawan, 2013).

Dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap

lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, disamping itu pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan pembagian tugas yang baik pada pemerintahan yang ada di lingkungan daerah tersebut.

Instansi pemerintah yang wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing, selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Menurut Cahyani & Utama (2015), akuntabilitas merupakan suatu kewajiban seseorang yang diberikan kepercayaan dalam mengelola sumber daya publik dan mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan pengungkapan tersebut, pemerintah harus mau serta mampu menjadi subyek pemberi informasi. Informasi tersebut terdiri atas aktivitas dan kinerja yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, relevan, dapat dipercaya dan konsisten. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja dilakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat yang berupa hak untuk mendapatkan informasi,

hak diberi penjelasan, hak untuk diperhatikan pendapatnya, serta hak menuntut pertanggungjawaban (Laely, 2016).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumberdaya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Akuntabilitas juga merupakan salah satu unsur pokok yang harus dipenuhi dalam mewujudkan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas memiliki keterkaitan dengan anggaran pemerintah daerah (Paramitha dan Gayatri, 2016).

Pada konteks pemerintah daerah sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran sehingga akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta mempermudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Kejelasan sasaran anggaran dalam pemerintah daerah berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suharono dan Solichin, 2006). Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Pengendalian akuntansi dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan yakni keandalan pelaporan keuangan dan menjaga kekayaan dan catatan akuntansi. Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Hal tersebut menekan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. (Indra Bastian 2011).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi atau laporan keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk memberikan mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Mei Anjarwati 2012).

Untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang baik diperlukan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula. Kinerja organisasi tergantung pada kinerja pegawainya, atau dengan kata lain kinerja pegawai akan memberikan kontribusi pada kinerja organisasi. Hal tersebut mengartikan bahwa peran perilaku anggota instansi pemerintahan mampu memberikan pengaruh atas kinerja instansi pemerintah itu pula. Keberhasilan capaian kinerja yang maksimal, sesuai dengan

harapan publik luas memerlukan kerja keras dan dorongan individu untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebuah motivasi kerja yang dicurahkan pada instansi pemerintah.

Pegawai yang memiliki motivasi kerja tentunya akan membuat pilihan terbaik untuk melakukan sesuatu. Motivasi kerja juga dapat memacu individunya untuk bekerja lebih keras, karena hal ini dapat menciptakan kepuasan diri pribadi individu tersebut dan tujuan instansi dapat dicapai. Sehingga dengan tercapaiannya tujuan instansi berarti kualitas kinerja instansi juga akan terealisasi dengan baik pula. Dengan kata lain penilaian capaian kinerja ditentukan oleh hasil kegiatan dari sisi sumber daya manusia (SDM) nya.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Pada akhir-akhir ini akuntabilitas kinerja pemerintahan menjadi sorotan publik karena masyarakat mulai mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan pemerintah itu sendiri, kinerja pemerintah didasarkan oleh kinerja aparatur pemerintah, aparatur pemerintahan sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintahan sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan, otonomi daerah

dan desentralisasi fiskal juga berdampak pada perlunya pemerintah daerah melakukan pembenahan sistem sistem akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah, hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik, dipihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik (Riantarno dan Azlina, 2011).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kabupaten Purbalingga yang berada di angka 57,75 atau CC (cukup baik/memadai) membuat Bupati Purbalingga berpesan kepada para birokrat untuk menggenjot kinerja lebih keras lagi. Hal tersebut disampaikan Bupati saat acara paparan hasil kinerja 2017 di ruang Ardi Lawet kompleks kantor Bupati Purbalingga, Senin (19/3/2018). Bupati Purbalingga mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menilai Lakip sebuah Pemerintahan termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga secara berkala satu tahun sekali. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu bupati meminta jatah kuota tambahan CPNS kepada Kemenpan-RB.

Namun, hasil kinerja para aparatur Purbalingga yang belum mencapai nilai B, hal itu belum bisa dilakukan. Oleh karena semangat menaikkan hasil kinerja para abdi Negara tersebut, bupati Purbalingga meminta kepada semua aparatur untuk bekerja keras melayani masyarakat dengan laporan yang akuntabel.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah: Zakiyudin dan Suyanto (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Herdjiono Hidayattullah (2015) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Afilu Hidayattullah Irine Herdjiono (2015) menyatakan bahwa Pengujian secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Angraeini dan Sherly (2014) menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setiawan (2013) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Harini Susilowati (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Putra Deki (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja manajerial SKPD.

Vina Sukmalinda (2013) menyatakan bahwa secara simultan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Cahyani dan Utama (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun sebaliknya, penelitian Pangumbalerang (2014) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Vina Sukmalinda (2013) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah

agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan memberikan kontribusi informasi serta landasan penelitian selanjutnya mengenai akuntabilitas kinerja instansi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel penelitiannya. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti hendak menambahkan variabel personal, yakni variabel motivasi kerja sebagai variabel independen. Alasan peneliti menambahkan variabel personal berupa motivasi kerja adalah karena peneliti rasa banyak penelitian-penelitian sebelumnya melakukan penelitian hanya sebatas dari sisi sistemnya saja. Sedangkan dalam organisasi yang baik itu tidak hanya sistemnya yang dinilai namun dari segi personal atau dari segi sumber dayanya juga harus diteliti lebih jauh.

Pentingnya penelitian ini dilakukan di kabupaten Purbalingga adalah karena di kabupaten Purbalingga belum ada penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan motivasi kerja pada SKPD yang ada di lingkungan kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui bagaimana SKPD Purbalingga dalam kejelasan, pengendalian dan sistem pelaporannya terhadap pihak yang memiliki hak untuk mengetahui informasi akuntabilitas kinerjanya sehingga kabupaten Purbalingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan fokus penelitian ini adalah pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sehingga dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh motivasi kerja terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah?

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang akuntansi kaitannya dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan pemerintah yang kaitannya dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perwujudan variabel - variabel yang mempengaruhi dan juga data dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.